



PERAN GENDER PEREMPUAN DALAM UPAYA MENCIPTAKAN PERDAMAIAN DEMI MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DI TINGKAT GLOBAL

Eny Latifah*¹, Rudi Abdullah²

¹Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia

Corresponding Author: eni.lathifah@gmail.com

| | |
|--|---|
| <p>Info Article</p> <p>Received : 03 Maret 2023</p> <p>Revised : 02 April 2023</p> <p>Accepted : 03 May 2023</p> <p>Publication : 31 May 2023</p> <hr/> <p>Keywords: Role, Gender, Women, Peace, Sustainable Development</p> <p>Kata Kunci: Peran, Gender, Perempuan, Perdamaian, Pembangunan Berkelanjutan</p> <hr/> <p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p>  | <p>Abstract: <i>Research using qualitative methods with this type of literature has the aim of knowing the role of women's gender in efforts to create peace and the role of realizing sustainable development at the global level. The results showed that the role of women's gender in creating peace from the countries of Indonesia, Afghanistan, India, Lebanon, Sudan, Pacific Islands, Central African Republic (CAR), Uganda, and Democratic Republic of Congo (DRC) are: (1). Women play a role as Peacekeeping operations; eradicate the suppression of women's rights, eradicate domestic violence, rape, and sexual harassment, (2). women play a role in empowering women, improving the economy of women (3) Female gender (Female Peacekeepers) who play a role in security for prevention. While the role of women's gender in realizing sustainable development is: (a) The role of promoting gender equality, increasing gender equality, increasing women's welfare. (b) Increasing women's welfare, both in the economic and political spheres and providing operational assistance in efforts to empower women.</i></p> <p>Abstrak: Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis kepustakaan ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran gender perempuan dalam upaya menciptakan perdamaian dan peran mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat global. Hasil penelitian menunjukkan peran gender perempuan dalam menciptakan perdamaian dari negara Indonesia, Afganistan, India, Lebanon, Sudan, Kepulauan Pasifik, Central African Republic (CAR), Uganda, dan Republik Demokratik Kongo (DRC) adalah: (1). Perempuan berperan Sebagai Peacekeeping operations; memberantas penindasan hak-hak perempuan, Memberantas KDRT, pemerkosaan, dan pelecehan seksual, (2). perempuan berperan dalam memperdayakan perempuan, meningkatkan perekonomian perempuan (3) Gender perempuan (<i>Female Peacekeepers</i>) yang berperan dalam keamanan untuk pencegahan. Sedangkan peran gender perempuan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah: (a) Peran memajukan kesetaraan gender, meningkatkan gender equality, menaikkan kesejahteraan perempuan.(b) Menaikkan kesejahteraan perempuan, baik dalam lingkup perekonomian maupun politik dan memberikan bantuan operasional dalam upaya pemberdayaan perempuan.</p> |
|--|---|

INTRODUCTION

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan tetap menjadi perhatian dalam pembangunan dan perdamaian dunia. Untuk pemberdayaan perempuan dan melindungi hak perempuan sudah menjadi kesepakatan global. Dimana pemerintah wajib memajukan dan melindungi hak perempuan agar mampu meningkatkan semangat dan komitmen untuk visioner yang tertanam dalam setiap kebijakan negara tidak hilang. Salah satu cara yaitu dengan membuat sebuah kebijakan yang mendukung peran perempuan dalam proses pembangunan yang berkelanjutan menjadi hal yang pasti.

Peran perempuan sangatlah penting dalam mempertahankan perdamaian untuk memperkuat ketahanan nasional. Komitmen internasional akan memberikan jaminan kepada perempuan agar bisa menjalankan peran untuk menjaga perdamaian, demokrasi, keamanan dan memperluas pembangunan serta mewujudkan hak asasinya.

Berbicara perempuan dan perdamaian, sudah banyak cerita diberbagai belahan dunia yang menunjukkan peran perempuan. Di Indonesia misalnya perempuan menunjukkan peranya atas kemerdekaan Indonesia dengan Gerakan Perempuan (Sebelum 1945) dimana ada Cut Nyak Dhien (Komandan perang Aceh) yang kemudian dilanjutkan Ratu Sima (Pimpinan Perempuan di Jawa Tengah yang terkenal kejujuranya) dan Raden Ajeng Kartini (Tokoh emansipasi perempuan. Tokoh-tokoh perempuan diatas menunjukkan bahwa perempuan mampu berperan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan terutama di bidang pendidikan dan politik(Nurzahraet al., 2021).

Pada tahun 1977 perkembangan gerakan kaum perempuan mulai bermunculan seperti isu munculnya wacana gender yang dilatabelakangi sekelompok feminisme di London yang awalnya mengangkat isu patriarkal kini memilih gender discourse.

Kasus-kasus yang menunjukkan adanya kekerasan kepada perempuan dalam dunia perang dianggap sebagai suatu yang lumrah. Seperti pemerkosaan massal yang terjadi di Bozniah, perempuan sebagai pelengkap (budak seks) kekuasaan pada perang dunia ke II Jepang yang mereka lakukan ketika “jugung ianfu” yaitu pemuasan seks setelah peperangan terjadi.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa peperangan adalah suatu aktivits yang mengerikan. Dampak dari peperangan bisa merugikan berbagai aspek. Kondisi ini sangat merugikan banyak orang dan mengancam perdamaian dunia. Dalam dunia peperangan baik itu peperangan antar negara maupun perang saudara, perempuan dan anak sering menjadi korban walau mereka tidak bersalah. Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan runtuhnya pemerintahan Afganistan yang diambil alih oleh Taliban. Afghanistan

merupakan negara yang berbahaya bagi perempuan. Mereka mengalami tekanan seperti susahny akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan serta mengalami kekerasan(Shamimi et al., 2022) . Pemerintah Afghanistan telah berupaya dengan meratifikasi Convention on the Elimination All Form of Discrimination Against Women (CEDAW) pada tahun 2003, namun hingga tahun 2013 komite CEDAW melaporkan bahwa pemerintah Afghanistan gagal dalam menaati komitmen implementasi CEDAW dalam hal perlindungan hak perempuan dinegara mereka.

Maka dari itu, muncul Women for Women International (WFWI) sebagai International Non-Governmental Organization (INGO) yang bertanggung jawab dalam membantu memberdayakan perempuan yang terdiskriminasi dengan langsung terjun pada perempuan level bawah di Afghanistan. WFWI melakukan pemberdayaan perempuan dengan memberikan berbagai macam pendidikan dan pelatihan terhadap perempuan.

Olehnya dibutuhkan keterlibatan perempuan dalam kemajuan agenda perdamaian dan keamanan memang menjadi bagian yang sangat penting untuk mengedukasi para anak-anak dan perempuan secara umum. Perempuan sering kali menjadi korban kekerasan dan menerima beban ganda dalam kondisi konflik, namun tak jarang mereka juga menjadi agen penjaga perdamaian.

Komitmen Indonesia terhadap pelibatan perempuan dalam proses penyelesaian konflik pun tidak tanggung-tanggung. Indonesia telah memiliki RAN P3AKS (Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial) dan tercatat sebagai penyumbang women peacekeepers atau agen penjaga perdamaian perempuan terbesar ke-7 di dunia dan pertama di Asia Tenggara dalam hal perlindungan penduduk sipil pada pergolakan di Suriah.

Olehnya menjadi penting keterlibatan perempuan sebagai agen perdamaian dunia. Penting juga kiranya untuk memahamai bahwa Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 yang diatur dalam hukum humaniter internasional berlaku penuh dalam hal sengketa bersenjata non internasional bertujuan untuk melindungi korban-korban dalam sengketa bersenjata non-internasional. Termasuk perlindungan terhadap penduduk sipil laki-laki maupun perempuan. Peran gender perempuan juga dapat dilihat dari pergerakan melalui pemberdayaan perempuan dalam pembangunan berkelanjutan seperti :

1. Wanita dan Pembangunan (WPD) dengan tujuan meningkatkan kemampuan perempuan dalam pembangunan secara selaras dan serasi proyek ini disebut proyek peningkatan peran perempuan atau disingkat P2W;

2. Gender dan Pembangunan (JDP) adalah pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan aspirasi, kepentingan dan peran pria dan perempuan yang memungkinkan perempuan mengejar ketinggalannya dari pria dan sebagai upaya mengubah hubungan gender yang merugikan salah satu pihak menuju hubungan gender yang selaras dan serasi.
3. Gender mainstreaming yakni suatu pendekatan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan di segala bidang (Parawansa, 2003).

Dari fenomena dan permasalahan yang ada peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian yang memberikan sebuah gambaran atas peran gender perempuan baik dalam menciptakan perdamaian dan juga mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tingkat global.

METHOD

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif (Sari et al., 2022). Taylor dan Procter menjelaskan bahwa tinjauan pustaka atau disebut juga kajian pustaka (literature review) (Mahanum, 2021). Jenis penelitian kepustakaan merupakan penelitian dengan cara studi literatur, pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan mengkonstruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan penelitian yang sudah ada (Mustofa et al., 2023)

Oleh karena itu, penelitian kualitatif dilakukan dengan desain penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur atau dalam bentuk perhitungan, melainkan mengungkap fenomena holistik-kontekstual dengan cara mengumpulkan data dari peneliti pada latar/setting yang natural dan menggunakannya sebagai kunci instrumen.

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan analisis induktif, sehingga proses dan makna berdasarkan sudut pandang subjek ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini. Desain penelitian kualitatif ini dapat digunakan sebagai metode dalam penelitian, karena merupakan desain komprehensif yang mudah diakses oleh kalangan akademisi dan peneliti. (Adlini et al., 2022).

Dalam penelitian ini ada pembatasan tahun yang diteliti yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dengan negara-negara yang terdiri dari : Indonesia, Afganistan, India, Lebanon, Sudan, Kepulauan Pasifik, Central African Republic (CAR), Uganda, dan Republik Demokratik Kongo (DRC).

RESULTS AND DISCUSSION

Results

Teori Peran

Peran dalam teori sosial Parson memiliki makna sebuah harapan yang diorganisir yang dikaitkan dengan interaksi tertentu yang mana akan membentuk orientasi motivasional individu terhadap lainnya. Secara sederhana Peran dapat diartikan sebagai berikut: (Hubeis, 2010)

- a. Peran yaitu aspek yang sifatnya dinamis dari sebuah status yang sudah dibentuk dengan pola dan ada di sekitar hak dan kewajiban tertentu;
- b. Peran memiliki hubungan dengan status seseorang atau kelompok tertentu atau situasi sosial yang dipengaruhi oleh harapan orang lain atas perilaku yang seharusnya ditampilkan oleh orang tersebut;
- c. Pelaksanaan dari peran sangat dipengaruhi oleh citra seseorang yang ingin adanya suatu perkembangan.
- d. Peran juga menyangkut nilai baik dan buruk, tinggi atau rendah, sedikit atau banyak.

Peran gender yaitu peran yang dibebankan pada seseorang atau kelompok tertentu dalam suatu masyarakat yang mana sangat ditentukan oleh keadaan mereka baik sebagai laki-laki atau perempuan yang sudah mencakup segala aspek penilaian. Peran gender perempuan dapat dianalisis dari perspektif posisi yang berkaitan pekerjaan produktif tidak langsung (domestik) dan produktif langsung (publik), yaitu: (Indah, 2013)

- a. Peran tradisi.

Mengurus rumah tangga, melahirkan dan mengasuh anak serta menjaga dan mendidiknya.

- b. Peran transisi.

Mempertahankan keharmonisan dan urusan rumah tangga menjadi tanggungjawab perempuan.

- c. Dwiperan.

Menjalankan peran domestik dan publik.

- d. Peran egalitarian.

Menjalankan kegiatan lebih banyak di luar.

- e. Peran kontemporer.

Perempuan mandiri dalam kesendirian.

Peran perempuan disini adalah peran yang memberikan dampak dan reaksi yang berarti atas suatu kegiatan yang mampu merubah keadaan dari yang tidak baik menjadi

lebih baik, dari hal yang sebelumnya belum ada menjadi ada dan merubah dari yang lemah menjadi kuat dalam segala bidang yang ada di dunia.

Sustainable Development Goals (SDGS)

Yang dimaksud SDGS adalah inisiatif secara global yang memiliki tujuan menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek ekonomi dan sosial, dan mampu bersinergi dengan lingkungan.(Iskandar, 2020). *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa merupakan pembangunan total atas desa dari seluruh aspek pembangunan dimana manfaatnya harus dapat dirasakan seluruh warga desa tanpa ada yang terlewat. Beberapa langkah dalam mendukung SDGs dengan program Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan taraf hidup bisa tumbuh secara merata (Hasanuddin & Achmad, 2022), pemberdayaan masyarakat dengan penguatan ekonomi lokal demi mewujudkan SDGs di Desa (Idul, 2022), Penguatan Potensi yang ada di Kelembagaan Desa juga dapat mempercepat pencapaian SDGs Desa (Tui & Ilato, 2022) seperti Urgensi Data SDGS dapat mendukung Tata Kelola Pemerintahan Tanpa Kemiskinan di tingkat Kelurahan(Muhammad et al., 2022), gerakan sinergi atas kebijakan program pekarangan pangan lestari dalam mengatasi kelaparan (Habibi, 2022) Program Pengelolaan Desa Wisata (Rahmawati, 2021)dan Penguatan di bidang pendidikan dengan pembentukan karakter melalui projek profil pelajar pancasila bagi guru di Sekolah (AR et al., 2023).

Literature review

Dalam rangka mendapatkan sumber data dari riset-riset terdahulu yang memngangkat permasalahan tentang peran gender dalam menciptakan perdamaian demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat global peneliti membuat analisis literature review yang didapatkan dari tahun 2019 sampai sekarang 2023.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

| TAHUN | TEMUAN |
|-------|---|
| 2019 | 1. Peran perempuan atas perdamaian dari penelitian ini ditunjukkan dengan kehadiran Wanita TNI sebagai pasukan perdamaian di Lebanon sebagai bukti kontribusi perempuan dalam keamanan, tidak hanya menjadi korban dalam perang melainkan juga menjadi aktor perdamaian yang melindungi sesama perempuan dan anak-anak. |

| | |
|--|---|
| | <p>Keterlibatan perempuan telah menjadi sebuah usaha bagi negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memasukkan peran mereka dan Indonesia hingga saat ini terus meningkatkan peran dan jumlah perempuan dalam peacekeeping operations yang tidak hanya di bidang bantuan kemanusiaan civil-military cooperations tetapi juga bidang-bidang lainnya. Perempuan hadir pasca konflik untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dengan tujuan untuk berupaya menyembuhkan trauma mereka dan membangkitkan kembali kepercayaan diri mereka. (Firohmatillah & Sudirman, 2019).</p> <p>2. Program-program yang dijalankan oleh UNIFEM (United Nations Development Fund For Women) bertujuan untuk mengatasi isu kekerasan seksual terhadap perempuan, menegakkan hak asasi perempuan, pemberdayaan perempuan, meningkatkan perekonomian perempuan, serta mempromosikan perempuan dalam proses perdamaian dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemerintahan. Dalam menjalankan program-program tersebut, UNIFEM bekerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah, LSM lokal, organisasi internasional, dan masyarakat Darfur khususnya perempuan. Program-program tersebut kemudian menentukan bagaimana peran dan fungsi UNIFEM. (Hakim, 2019).</p> <p>3. Sebuah rasionalisasi kajian eko-feminisme ini, karena Ada banyak perspektif mengenai klaim yang dibuat oleh pemerintah atau gerakan itu sendiri. Analisis eko-feminisme muncul dalam bentuk akuntabilitas analisis perempuan dan alam sebagai dua objek perjuangan yang dilakukan Maathai, selain itu ekofeminisme muncul sebagai alat perjuangan yang tidak fokus pada perjuangan perempuan alam, tetapi juga fokus pada isu penindasan hak-hak perempuan melalui perempuan perjuangan dan alam. (Maulana & Supriatna, 2019)</p> |
| | <p>Penemuan pada tahun 2019 atas peran gender perempuan dalam menciptakan perdamaian untuk mewujudkan SDGs adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai Peacekeeping operations; 2. Melalui UNIFEM (United Nations Development Fund For Women) perempuan berperan untuk: pemberdayaan perempuan, meningkatkan perekonomian |

| | |
|-------------|---|
| | <p>perempuan, serta mempromosikan perempuan dalam proses perdamaian dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemerintahan; dan</p> <p>3. Berperan sebagai pejuang dalam memberantas penindasan hak-hak perempuan.</p> |
| <p>2020</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran perempuan dalam mewujudkan perdamaian dilihat dengan bertindak sebagai pengambil keputusan dan mendorong respons sensitif gender terhadap pandemi COVID-19. Semakin tinggi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, semakin tinggi kemungkinan mengesahkan dan menerapkan undang-undang untuk memajukan kesetaraan gender, termasuk hukum yang berkaitan dengan pengakhiran KDRT, pemerkosaan, dan pelecehan seksual.(Hutabarat et al., 2020). 2. Peran United Nations Women sebagai entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk untuk mendukung perempuan secara global atas kesepakatan dari Majelis Umum PBB serta sebagai bagian dari agenda reformasi PBB. Ditemukan tiga peran penting UN Woman dalam mengatasi tindak kekerasan seksual terhadap perempuan, yaitu: Memberikan pelatihan bagi penyedia layanan perempuan korban kekerasan dan reintegrasi social. Memberikan pemahaman hukum, pemberdayaan ekonomi, memfasilitasi pendampingan layanan, dan memfasilitasi sarana/prasarana pelayanan bagi perempuan korban kekerasan serta perlindungan hak perempuan lintas sektor dengan menguatkan peran serta para pemangku kepentingan, lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, & media massa.(Suri et al., 2020) 3. Di banyak negara di mana misi penjaga perdamaian dilakukan,kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual terkait konflik terjadi dalam angka yang mengkhawatirkan. Baik warga sipil maupun pejuang, perempuan dan anak-anak adalah korban terbanyak dalam suatu konflik. Konflik bersenjata menjadi pengalaman traumatis tersendiri bagi tiap individu yang mengalaminya. Perempuan pemelihara perdamaian mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa berada pada suatu Negara untuk membantu memulihkan kepercayaan orang-orang yang mengalami trauma pasca-konflik. Namun, hingga saat ini presentase jumlah perempuan masih sangat |

| | |
|-------------|---|
| | <p>rendah dibandingkan laki-laki dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. UN Charter memberikan mandat kepada Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Semua bidang pemeliharaan perdamaian, perempuan penjaga perdamaian telah membuktikan bahwa mereka dapat melakukan peran yang sama, dengan standar dan dalam kondisi sulit yang sama. Untuk itu, adalah keharusan operasional PBB untuk merekrut dan mempertahankan pasukan perempuan penjaga perdamaian. (Istiana Hasan & Kurnia Putra, 2020)</p> |
| | <p>Penelitian yang ditemukan tahun 2020 menunjukkan peran gender perempuan dalam menjaga perdamaian adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran memajukan kesetaraan gender, Memberantas KDRT, pemerkosaan, dan pelecehan seksual; 2. Memberikan pelatihan bagi penyedia layanan perempuan korban kekerasan dan reintegrasi social. Memberikan pemahaman hukum, pemberdayaan ekonomi, memfasilitasi pendampingan layanan, dan memfasilitasi sarana/prasarana pelayanan bagi perempuan korban kekerasan serta perlindungan hak perempuan lintas sektor dengan menguatkan peran serta para pemangku kepentingan, lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa; 3. Sebagai penjaga perdamaian |
| <p>2021</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut Inong Balee (eks-kombatan GAM perempuan/janda GAM) bahwasanya perdamaian yang membawa reintegrasi tidak serta merta membawa kesejahteraan menyeluruh kepada mereka. (1) Reintegrasi Inong Balee (eks-kombatan GAM perempuan/janda GAM) melalui Liga Inong Aceh telah tercapai, walaupun bagi Inong Balee secara keseluruhan belum mendapatkan kesejahtraannya, (2) Perdamaian positif di Aceh belum tercapai, sehingga masih terdapat potensi konflik di masa mendatang, (3) Pemenuhan kesejahteraan dapat mendorong transformasi dari perdamaian negatif ke perdamaian positif. Sebagai salah satu penunjang keamanan nasional, perdamaian positif di Aceh dapat diwujudkan dengan mengimplementasikan integritas, meningkatkan martabat penduduk setempat, mengamalkan |

| | |
|--|---|
| | <p>resolusi konflik dan mengakui nilai-nilai keislaman yang menjadi dasar hukum di Aceh. (Nurzahra et al., 2021).</p> <p>2. Konflik yang terjadi di Lebanon yang kompleks hingga berdampak pada kerusakan, dan jatuhnya korban utamanya anak – anak dan perempuan. Sehingga operasi perdamaian yang dibutuhkan bersifat multidimensional. Agar dapat mencapai implementasi operasi perdamaian UNIFIL yang berkelanjutan di Lebanon, maka keterlibatan tentara perempuan penting memainkan peranan utama pada operasi. Berdasarkan resolusi PBB 1325 (2000) mengenai perempuan, perdamaian, dan keamanan. Pengaruh pendekatan multidimensional keterlibatan tentara perempuan dalam operasi perdamaian UNIFIL di Lebanon menunjukkan bahwa tentara perempuan cukup baik memberikan pengaruhnya dalam operasi perdamaian UNIFIL, pada implementasi setiap dimensi dari multidimensional peacekeeping yang membawa operasi dari peacekeeping ke arah peacebuilding.(Astika Putri, 2021)</p> <p>3. UN Women mengusung program-program sebagai solusi dari mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan Kolombia, dengan berhasil menaikkan kesejahteraan perempuan, baik dalam lingkup perekonomian maupun politik. Tak hanya itu UN Women selaku pendamping Internasional dalam perjanjian damai dengan dimasukkannya sub-gender pada perjanjian akhir. Hal ini kemudian menjadi awal perempuan dapat terlepas dari jeratan kekerasan yang telah terjadi selama bertahun-tahun akibat Konflik bersenjata. (Nirwana, 2021)</p> <p>4. Uganda memiliki sejarah panjang konflik sipil dan perang saudara yang menyisakan ketidakstabilan politik dan ekonomi negara. Keadaan tersebut membuat Uganda lebih memprioritaskan perkembangan ekonomi dan politiknya untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain, dan mengesampingkan permasalahan yang dianggap minor seperti pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan baru dijadikan prioritas oleh Uganda setelah menyadari keterkaitannya dengan keseimbangan politik dan ekonomi. Uganda</p> |
|--|---|

| | |
|-------------|--|
| | <p>kemudian mengundang UN Women masuk untuk membantu mengupayakan pemberdayaan perempuan bagi masyarakatnya. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis peran dan fungsi UN Women dalam upaya pemberdayaan perempuan di Uganda pada tahun 2014 – 2021. Penulis menggunakan konsep organisasi internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer. UN Women berhasil memenuhi perannya sebagai instrumen, dan aktor independen. UN Women juga memenuhi fungsi artikulasi kepentingan, menciptakan norma, melakukan rekrutmen anggota, melakukan sosialisasi norma, menjadi penyedia informasi, serta memberikan bantuan operasional dalam upaya pemberdayaan perempuan di Uganda.(Mahardika, 2021)</p> |
| | <p>Penelitian di tahun 2021 menunjukkan peran gender perempuan dalam menciptakan perdamaian untuk mewujudkan SDGs yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan martabat penduduk (Aceh), mengamalkan resolusi konflik dan mengakui nilai-nilai keislaman yang menjadi dasar hukum Islam (Aceh); 2. Menaikkan kesejahteraan perempuan, baik dalam lingkup perekonomian maupun politik; 3. Perempuan dapat terlepas dari jeratan kekerasan yang telah terjadi selama bertahun-tahun akibat Konflik bersenjata. 4. Sebagai aktor independen dan memberikan bantuan operasional dalam upaya pemberdayaan perempuan. |
| <p>2022</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran perempuan PAPUA dalam kegiatan keagamaan cukup tinggi, baik dalam pertemuan rutin keagamaan dan keterlibatan dalam perencanaan program kegiatan keagamaan serta pendidikan perdamaian. Akan tetapi tetapi peran perempuan hanya pada "posisi mendengarkan". Hasil ini membuktikan bahwa terjadi ketidakseimbangan kekuatan pengambilan keputusan sistemik dalam masyarakat. Dengan demikian dibutuhkan pengembangan kapasitas terhadap perempuan Papua dan kelembagaan agama, adat, masyarakat dan pemerintah supaya peran perempuan dapat dimaksimalkan dalam perdamaian dan kohesi sosial. (Dawan & Larasati, 2022) |

| | |
|--|--|
| | <p>2. Hukum Islam jelas terlihat nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender yang harusnya menjadi acuan masyarakat Indonesia. Tulisan ini ingin menjabarkan bahwa internalisasi nilai keadilan dan kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam bisa menjadi salah satu strategi pembangunan Indonesia Emas Berkelanjutan 2045. Bisa disimpulkan bahwa KHI cukup menampakkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi kunci pembangunan Indonesia.(Mansyuroh & Luthfi, 2022)</p> <p>3. Perang saudara yang terjadi di Central African Republic (CAR) berdampak negatif, khususnya perempuan dan anak sebagai korban. Multidimensional Integrated Stabilization Mission In The Central African Republic (MINUSCA) menjadi salah satu misi penjaga perdamaian yang fokus mandatnya untuk mengatasi dan meningkatkan partisipasi perempuan di wilayah konflik. Selama 8 tahun keberadaan misi ini, sorotan utama atas hal-hal yang berkenaan dengan konflik dalam hal ini perempuan memunculkan re-focusing pada pengarusutamaan gender sebagai usaha untuk meminimalisir risiko yang lebih besar. Konflik CAR memerlukan perhatian khusus, dikarenakan peran mempromosikan, memfasilitasi, mendukung dan kerja sama belum terlaksana secara penuh di masa kepemimpinan Kapten Marcia Braga. Oleh karena itu, pada peran mendukung dan kerja sama harus ditinjau kembali agar dapat mengefisiensi rencana kerja yang ditetapkan.(BAHAGIANDA, 2022)</p> <p>4. Kesetaraan gender merupakan suatu isu yang dihadapi oleh negaranegara di dunia dan internasional. India sebagai salah satu negara dengan isu kesenjangan gender yang cukup tinggi dari tahun ketahun pada 2016 hingga 2021 yang tidak signifikan. Serta India termasuk negara di Asia Selatan dengan gap kesenjangan gender yang buruk. Faktor yang mendukung meliputi, permasalahan keluarga, sosial, ras, perkawinan, ekonomi, agama dan budaya serta kesadaran individu yang mana hal tersebut diakibatkan diskriminasi, kekerasan perempuan serta kepercayaan kasta. Nilai yang dipegang teguh oleh</p> |
|--|--|

| | |
|-------------|---|
| | <p>masyarakat India terhadap posisi perempuan yang disebut prinsip pativrata atau yang dikenal dengan budaya patriarki. Sehingga UN Women sebagai organisasi internasional PBB yang menaungi permasalahan pada perempuan berupaya mengatasi permasalahan yang menjadi ancaman bagi perempuan di India(Maisan, 2022)</p> <p>5. Efektivitas UN Women untuk meningkatkan gender equality di Afghanistan dilakukan melalui beberapa program dan juga upaya yang membuahkan hasil dan membawa dampak besar dalam hal meningkatkan kesadaran bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam negara. Kesimpulan tulisan ini menunjukkan bahwa UN Women di Afghanistan mampu menanggulangi masalah gender di Afghanistan dan mewujudkan tujuan A-SDGs dengan mewujudkan beberapa poin dalam SDGs demi pembangunan negara terutama dalam meningkatkan gender equality. (Shamimi et al., 2022)</p> |
| | <p>Penelitian tahun 2022 menunjukkan peran perempuan dalam menciptakan perdamaian dalam rangka mewujudkan SDGs adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjaga perdamaian yang fokus mandatnya untuk mengatasi dan meningkatkan partisipasi perempuan di wilayah konflik, 2. Menaungi permasalahan pada perempuan berupaya mengatasi permasalahan yang menjadi ancaman bagi perempuan di India. 3. Menanggulangi masalah gender di Afghanistan dan mewujudkan tujuan A-SDGs dengan mewujudkan beberapa poin dalam SDGs demi pembangunan negara terutama dalam meningkatkan gender equality. |
| <p>2023</p> | <p>1. Peran perempuan dalam menciptakan perdamaian dapat dilihat UN Women dalam upaya pemberdayaan perempuan di Lebanon dalam masa-masa krisis tahun (2018-2020). Upaya tersebut dilakukan, mengingat UN Women merupakan entitas PBB yang bergerak dalam bidang perempuan khususnya terkait diskriminasi perempuan dengan prinsip ketidaksetaraan gender. Peran serta upaya kerjasama dengan pemerintah serta NGO lainnya membawa dampak yang cukup baik bagi kehidupan perempuan di Lebanon dalam upaya mengurangi diskriminasi melalui pemberdayaan perempuan.(MILA FATMI, 2023).</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>2. Penerapan nilai-nilai feminis dalam gerakan wanita dalam membangun perdamaian di kawasan Kepulauan Pasifik muncul akibat tingginya permasalahan yang dihadapi wanita akibat ketidaksetaraan dalam konflik dan kehidupan sehari-hari. Penerapan feminisme dalam pembangunan perdamaian di kawasan ini dilakukan berdampingan dengan pandangan tradisional tentang wanita yang dianut masyarakat Kepulauan Pasifik, berangkat dari mayoritas gerakan di kawasan Kepulauan Pasifik yang melakukan hal yang sama alih-alih menggeser nilai-nilai yang ada. Namun, masalah terbesar yang belum terselesaikan adalah kurangnya keterwakilan perempuan di legislatif negara-negara Kepulauan Pasifik, yang mendorong gerakan feminis dalam peacebuilding untuk fokus di tingkat regional.(Prihadiansyah, 2023)</p> <p>3. Gender perempuan (female peacekeepers) yang berperan dalam keamanan untuk pencegahan ataupun resolusi konflik, bina damai, penjagaan perdamaian, rehabilitasi dan rekonstruksi. Akan tetapi hanya 2 orang female peacekeepers Indonesia dari 850 orang jumlah pasukan karena perempuan dianggap kurang memiliki hak untuk berada di ruang publik terutama dalam bidang negara dan pertahanan dan dibatasi perannya dengan adanya persyaratan bahwa tentara wanita harus memiliki tugas yang bersifat non-tempur. Hal ini dikarenakan pertempuran bukanlah sebuah kodrat dari perempuan. Sampai saat ini, jumlah perbandingan female peacekeepers Indonesia dengan laki-lakinya yakni hanya menduduki 4% untuk wanita dan 96% untuk laki-laki. Pandangan ini merupakan budaya patriarki yang melekat pada masyarakat Indonesia sehingga perempuan masih dianggap marjinal. (Khairunnisa & Adeliya, 2023)</p> <p>4. Di tengah budaya patriarki yang menindas, konflik berkepanjangan di Sudan Selatan pada kurun waktu 2005-2018 telah menyebabkan perempuan mengalami diskriminasi dan kekerasan. Ketidakpuasan para aktivis perempuan akan sistem kemasyarakatan dan konflik berkepanjangan, akhirnya mendorong mereka terlibat dalam aktivitas bina damai. Perempuan berperan dalam proses bina damai pada setiap</p> |
|--|--|

| | |
|---|--|
| | <p>tingkatan piramida aktor mulai dari tingkat akar rumput, menengah, hingga atas. Perubahan positif dan transformatif tergambar dari peran yang mereka lakukan. Di tingkat atas, upaya yang dilakukan telah mendorong pemerintah Sudan Selatan melibatkan aktivis perempuan dalam proses negosiasi perdamaian dengan Sudan dan menjamin kesetaraan gender dalam konstitusi yang dirumuskan. Di tingkat menengah dan tingkat bawah, proses bina damai oleh aktivis perempuan berhasil meyakinkan masyarakat Sudan Selatan untuk mendukung implementasi kesetaraan gender sebagai bagian dari penyelesaian konflik. (Andris & Tambunan, 2023)</p> <p>5. Terlepas dari tekanan internasional yang terus berlanjut, pemerintah Kongo belum mengatasi kesenjangan kewajibannya untuk mengatasi kekerasan berbasis gender. Terlebih lagi, diskriminasi dialami oleh perempuan dan anak perempuan Kongo. Pengalaman tersebut menjadikan UN Women sebagai salah satu anak organisasi PBB untuk bertindak mengatasi diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi di Republik Demokratik Kongo (DRC). Kajian ini bertujuan untuk mengkaji peran UN Women dalam mengatasi diskriminasi terhadap perempuan di DRC selama periode 2017 hingga 2020. UN Women sebagai LSM memiliki peran dalam menghapuskan diskriminasi yang terjadi di DRC selama 2017-2020, meski belum sepenuhnya hilang. Selain itu, UN Women juga menjalankan perannya sebagai NGO dengan strategi Transnational Advocacy Network dengan menerapkan Politik Informasi, Politik Simbolik, Politik Leverage, dan Politik Akuntabilitas. (Dewi & Sugito, 2023)</p> |
| <p>Penelitian tahun 2023 menunjukkan peran perempuan dalam menciptakan perdamaian dalam rangka mewujudkan SDGs adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perempuan di Lebanon dalam upaya mengurangi diskriminasi melalui pemberdayaan Perempuan; 2. Membangun perdamaian di kawasan Kepulauan Pasifik yang mendorong gerakan feminis dalam peacebuilding untuk fokus di tingkat regional; | |

3. Gender perempuan (female peacekeepers) yang berperan dalam keamanan untuk pencegahan ataupun resolusi konflik, bina damai, penjagaan perdamaian, rehabilitasi dan rekonstruksi;
4. Bina damai oleh aktivis perempuan berhasil meyakinkan masyarakat Sudan Selatan untuk mendukung implementasi kesetaraan gender sebagai bagian dari penyelesaian konflik;
5. Mengatasi diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi di Republik Demokratik Kongo (DRC).

Sumber: Data yang sudah dikelola.

Discussion

Peran Gender Perempuan Dalam Menciptakan Perdamaian Di Tingkat Global

Perempuan berperan Sebagai Peacekeeping operations dilihat dari Perspektif gender dalam keamanan telah menunjukkan bahwa kehadiran Wanita TNI sebagai pasukan perdamaian adalah salah satu contoh keamanan melalui pandangan feminin (Maulana & Supriatna, 2019) keamanan tidak hanya ditujukan untuk negara saja melainkan juga masyarakat yang ada didalamnya yang terkena dampak dari perang. Keamanan tidak lagi berfokus kepada negara saja melainkan juga individu yang termanjinkan yaitu perempuan dan anak-anak yang terkena trauma dan pelecehan seksual dan tindak kekerasan. (Hakim, 2019). Karena setiap dimensi dari multidimensional peacekeeping yang membawa operasi dari peacekeeping ke arah peacebuilding. (Astika Putri, 2021).

Perempuan hadir pasca konflik untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dengan tujuan untuk berupaya menyembuhkan trauma mereka dan membangkitkan kembali kepercayaan diri mereka. (Firohmatillah & Sudirman, 2019). Perempuan penjaga perdamaian telah membuktikan bahwa mereka dapat melakukan peran yang sama, dengan standar dan dalam kondisi sulit yang sama. Untuk itu, adalah keharusan operasional PBB untuk merekrut dan mempertahankan pasukan perempuan penjaga perdamaian. (Istiana Hasan & Kurnia Putra, 2020)

Adanya peran perempuan pada masa pandemi saat ini sangat diperlukan, mengingat perempuan berada di garis depan sebagai tenaga medis, ibu rumah tangga, pengasuh anak serta menjadi bagian dari komunitas di lingkungannya. Semakin tinggi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, semakin tinggi kemungkinan mengesahkan dan menerapkan undang-undang untuk memajukan kesetaraan gender,

termasuk hukum yang berkaitan dengan pengakhiran KDRT, pemerkosaan, dan pelecehan seksual (Hutabarat et al., 2020).

Saat ini dibutuhkan pengembangan kapasitas terhadap perempuan seperti halnya yang terjadi di Papua dan kelembagaan agama, adat, masyarakat dan pemerintah supaya peran perempuan dapat dimaksimalkan dalam perdamaian dan kohesi sosial. (Dawan & Larasati, 2022). Perempuan hadir pasca konflik untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dengan tujuan untuk berupaya menyembuhkan trauma mereka dan membangkitkan kembali kepercayaan diri mereka. (Firohmatillah & Sudirman, 2019).

Menurut Inong Balee (eks-kombatan GAM perempuan/janda GAM) bahwasanya perdamaian yang membawa reintegrasi tidak serta merta membawa kesejahteraan menyeluruh kepada mereka. Liga Inong Aceh (LINA). LINA merupakan wadah organisasi Ureung Inong Aceh (perempuan Aceh) pascakonflik menunjukkan bahwa: (1) Reintegrasi Inong Balee melalui Liga Inong Aceh telah tercapai, walaupun bagi Inong Balee secara keseluruhan belum mendapatkan kesejahteraannya, (2) Perdamaian positif di Aceh belum tercapai, sehingga masih terdapat potensi konflik di masa mendatang, (3) Pemenuhan kesejahteraan dapat mendorong transformasi dari perdamaian negatif ke perdamaian positif. Sebagai salah satu penunjang keamanan nasional, perdamaian positif di Aceh dapat diwujudkan dengan mengimplementasikan integritas, meningkatkan martabat penduduk setempat, mengamalkan resolusi konflik dan mengakui nilai-nilai keislaman yang menjadi dasar hukum di Aceh. (Nurzahra et al., 2021).

Pandangan atas budaya patriarki yang melekat pada masyarakat Indonesia sehingga perempuan masih dianggap marjinal. (Khairunnisa & Adeliya, 2023) Ada kurangnya keterwakilan perempuan di legislatif negara-negara Kepulauan Pasifik, yang mendorong gerakan feminis dalam peacebuilding untuk fokus di tingkat regional. (Prihadiansyah, 2023)

Konflik Central African Republic (CAR) memerlukan perhatian khusus, dikarenakan peran mempromosikan, memfasilitasi, mendukung dan kerja sama belum terlaksana secara penuh di masa kepemimpinan Kapten Marcia Braga. Oleh karena itu, pada peran mendukung dan kerja sama harus ditinjau kembali agar dapat mengefisiensi rencana kerja yang ditetapkan. (Bahagianda, 2022)

Nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat India terhadap posisi perempuan yang disebut prinsip *pativrata* atau yang dikenal dengan budaya patriarki. Sehingga UN Women sebagai organisasi internasional PBB yang menaungi permasalahan pada perempuan berupaya mengatasi permasalahan yang menjadi ancaman bagi perempuan di

India. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis peran UN Women dalam implementasi CEDAW untuk mengatasi permasalahan kesetaraan gender di India pada tahun 2016-2021 dengan menggunakan sudut pandang Internasional Organizations and Implementation yang ditulis oleh Jutta Joachim yang menggunakan pendekatan manajerial (management Approach) dan pendekatan normatif (normative Approach) dalam implementasi CEDAW dalam meratifikasi, serta upaya yang dilakukan meliputi Monitoring, Peningkatan Kapasitas dan Problem Solving oleh UN Women dengan mengimplemetasikan pasal CEDAW.(Maisan, 2022)

Aktivis perempuan berperan dalam proses bina damai pada setiap tingkatan piramida aktor mulai dari tingkat akar rumput, menengah, hingga atas. Perubahan positif dan transformatif tergambar dari peran yang mereka lakukan. Di tingkat atas, upaya yang dilakukan telah mendorong pemerintah Sudan Selatan melibatkan aktivis perempuan dalam proses negosiasi perdamaian dengan Sudan dan menjamin kesetaraan gender dalam konstitusi yang dirumuskan. Di tingkat menengah dan tingkat bawah, proses bina damai oleh aktivis perempuan berhasil meyakinkan masyarakat Sudan Selatan untuk mendukung implementasi kesetaraan gender sebagai bagian dari penyelesaian konflik. (Andris & Tambunan, 2023)

Peran Gender Perempuan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Tingkat Global

Kondisi Perekonomian diberbagai negara tidak terkecuali Indonesia semakin sulit baik masa pandemi atau pasca pandemi. Konflik internal keluarga dan meningkatnya risiko tinggi yaitu kehilangan pekerjaan dan pendapatan, menghadapi kekerasan, eksploitasi, pelecehan selama masa krisis dan karantina. Hal tersebut menjadi alarm yang mendesak bagi setiap pihak untuk segera berbenah diri dan mencari solusi bagi permasalahan ini. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu kuantitatif dengan format deskriptif, data dan sumber data sekunder dari informasi yang dibutuhkan (Hutabarat et al., 2020). Efektivitas UN Women untuk meningkatkan gender equality di Afghanistan dilakukan melalui beberapa program dan juga upaya yang membuahkan hasil dan membawa dampak besar dalam hal meningkatkan kesadaran bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam negara. Kesimpulan tulisan ini menunjukkan bahwa UN Women di Afghanistan mampu menanggulangi masalah gender di Afghanistan dan mewujudkan tujuan A-SDGs dengan mewujudkan beberapa poin dalam SDGs demi

pembangunan negara terutama dalam meningkatkan gender equality. (Shamimi et al., 2022)

Adanya peran gender perempuan juga bisa dilihat dari UN Women dalam upaya pemberdayaan perempuan di Lebanon dalam masa-masa krisis tahun (2018-2020). Upaya tersebut dilakukan, mengingat UN Women merupakan entitas PBB yang bergerak dalam bidang perempuan khususnya terkait diskriminasi perempuan dengan prinsip ketidaksetaraan gender. Lebanon merupakan salah satu negara di Timur tengah yang masih mengalami diskriminasi perempuan cukup tinggi yang disebabkan oleh sistem politik sektariannya yang disebut “confessionalism”. Hal ini menunjukkan peran serta upaya kerjasama dengan pemerintah serta NGO lainnya membawa dampak yang cukup baik bagi kehidupan perempuan di Lebanon dalam upaya mengurangi diskriminasi melalui pemberdayaan perempuan. (Mila Fatmi, 2023). Kompilasi Hukum Islam cukup menampakkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi kunci pembangunan Indonesia. (Mansyuroh & Luthfi, 2022)

Upaya pemberdayaan perempuan di Uganda pada tahun 2014 – 2021. Penulis menggunakan konsep organisasi internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer. UN Women berhasil memenuhi perannya sebagai instrumen, dan aktor independen. UN Women juga memenuhi fungsi artikulasi kepentingan, menciptakan norma, melakukan rekrutmen anggota, melakukan sosialisasi norma, menjadi penyedia informasi, serta memberikan bantuan operasional dalam upaya pemberdayaan perempuan di Uganda. (Mahardika, 2021). Selain itu, UN Women juga menjalankan perannya sebagai NGO dengan strategi Transnational Advocacy Network dengan menerapkan Politik Informasi, Politik Simbolik, Politik Leverage, dan Politik Akuntabilitas (Dewi & Sugito, 2023). Implementasi pengarusutamaan gender sebagai upaya mewujudkan tujuan SDGs belum optimal dilaksanakan dengan indikator yang menyatakan bahwa (1) Permasalahan pencapaian kesetaraan gender melalui penghapusan kekerasan seksual di ruang publik dan ruang pribadi sulit untuk dikendalikan, (2) Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi sudah jelas dan terperinci, dan (3) Hadirnya berbagai faktor diluar variabel kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi. (Siregar, 2022).

Terdapat tiga peran penting UN Woman dalam mengatasi tindak kekerasan seksual terhadap perempuan, yaitu: Memberikan pelatihan bagi penyedia layanan perempuan korban jeratan kekerasan yang telah terjadi selama bertahun-tahun akibat Konflik

bersenjata dan reintegrasi social(Nirwana, 2021). Memberikan pemahaman hukum, pemberdayaan ekonomi, memfasilitasi pendampingan layanan, dan memfasilitasi sarana/prasarana pelayanan bagi perempuan korban kekerasan serta perlindungan hak perempuan lintas sektor dengan menguatkan peran serta para pemangku kepentingan, lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa.(Suri et al., 2020)

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka di Tarik Kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Peran gender perempuan dalam menciptakan perdamaian di Tingkat Global adalah:
 - a. Perempuan berperan Sebagai Peacekeeping-operations; memberantas penindasan hak-hak perempuan, Memberantas KDRT, pemerkosaan, dan pelecehan seksual.
 - b. Perempuan berperan dalam memperdayakan perempuan, meningkatkan perekonomian perempuan, serta mempromosikan perempuan dalam proses perdamaian dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemerintahan; penjaga perdamaian, meningkatkan partisipasi perempuan di wilayah konflik, terlepas dari jeratan kekerasan.
 - c. Gender perempuan (female peacekeepers) yang berperan dalam keamanan untuk pencegahan ataupun resolusi konflik, bina damai, penjagaan perdamaian, rehabilitasi dan rekonstruksi.
2. Peran gender perempuan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Tingkat Global adalah:
 - a. Peran memajukan kesetaraan gender,meningkatkan gender equality, menaikkan kesejahteraan perempuan, menguatkan peran serta para pemangku kepentingan, lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa,
 - b. Menaikkan kesejahteraan perempuan, baik dalam lingkup perekonomian maupun politik; mengurangi diskriminasi melalui pemberdayaan perempuan dan Sebagai aktor independen dan memberikan bantuan operasional dalam upaya pemberdayaan perempuan.

REFERENCES

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). METODE PENELITIAN KUALITATIF STUDI PUSTAKA. Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 6(1), 974–980.

- Andris, M. F. A., & Tambunan, E. M. B. (2023). PERAN PEREMPUAN DALAM PROSES BINA DAMAI: STUDI KASUS AKTIVIS PEREMPUAN DI SUDAN SELATAN (2005-2018). *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 19(1), 1–24.
- Anggun Nadiya, Ummul Izzah, F., Prezilia Bahri, F., Mayang Sari, T., & Tasya Jadidah, I. (2023). ANALISIS PENGARUH GAME ONLINE TERADAP PRILAKU SOSIAL ANAK SEKOLAH DASAR. *JIMR : Journal Of International Multidisciplinary Research*, 2(02), 241–249. <https://doi.org/10.62668/jimr.v2i02.879>
- AR, M. M., Hardiansyah, F., Aini, K., Armadi, A., & Astutik, C. (2023). PELATIHAN GAME EDUKASI BERBASIS SDGs DALAM UPAYA MEMBENTUK KARAKTER MELALUI PENGUATAN PROJEK PROFIL PELAJAR PANCASILA BAGI GURU MI ZIYADATUL ULUM DESA KAMBINGAN BARAT. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 4(1), 416–424.
- Astika Putri, W. (2021). PENGARUH PENDEKATAN MULTIDIMENSIONAL TENTARA PEREMPUAN DALAM OPERASI PERDAMAIAN UNIFIL DI LEBANON.
- Bahagianda, G. S. Q. (2022). PERAN GENDER ADVISER DALAM PENANGANAN GENDER MAINSTREAMING PADA MISI MULTIDIMENSIONAL INTEGRATED STABILIZATION MISSION IN THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (MINUSCA), 2017-2019.
- Damara, D., Kholiq, A. ., Latifah, E., & Abdullah, R. (2023). PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM ATAS JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFT). *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 2(02). <https://doi.org/10.62668/jide.v2i02.1190>
- Dawan, A., & Larasati, A. M. (2022). MENJADIKAN PEREMPUAN PAPUA YANG BERDAYA (STUDY ANALISA GESI TERHADAP PEREMPUAN PAPUA SEBAGAI AGEN PERDAMAIAN DAN KOHESI SOSIAL). *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar*, 5(1), 68–83.
- Dewi, N. K., & Sugito, S. (2023). PERAN UN WOMEN DALAM MENANGGULANGI DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO (RDK) PADA TAHUN 2017-2020. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 4449–4456.

- Fatmawati, R., Alwi, S. ., & Tajuddin, T. (2024). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA PUTEEMATA KECAMATAN LADONGI KABUPATEN KOLAKA TIMUR. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 3(01), 78–88. <https://doi.org/10.62668/jide.v3i01.1123>
- Febriyanti, L. ., Tanaya, A. N. ., Puspita Sari, K. S. A. ., Taufiqqur, A. A. ., & Febrianita, R. . (2023). PEMBERDAYAAN IBU-IBU PKK MELALUI PELATIHAN PEMBUATAN ABON BANDENG DI KELURAHAN KEPUTIH KOTA SURABAYA. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka*, 2(06), 348–355. <https://doi.org/10.62668/sabangka.v2i06.937>
- Febrianto, M. A. ., Umbara, N. B. ., & Safaruddin, S. (2022). DAMPAK PERKEMBANGAN DAN PROSES PEMBUATAN SEMEN PADA PT. SEMEN BATURAJA. *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 1(04), 619–639. <https://doi.org/10.62668/bharasumba.v1i04.292>
- Firohmatillah, Z. P., & Sudirman, A. (2019). PERAN KORPS WANITA TNI SEBAGAI PASUKAN PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PBB DALAM HUMANITARIAN ASSISTANCE DI LEBANON. *Indonesian Perspective*, 4(2), 133–149.
- Habibi, M. (2022). SINERGITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEKARANGAN PANGAN LESTARI MENCAPAI SDGS TANPA KELAPARAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA. 5(1), 197–206.
- Hakim, S. A. (2019). PERAN DAN FUNGSI UNITED NATIONS DEVELOPMENT FUND FOR WOMEN (UNIFEM) DALAM UPAYA MENGATASI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM KONFLIK BERSENJATA DI DARFUR 2005-2010.
- Hasanuddin, H., & Achmad, S. (2022). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN SDGS DESA UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TARAF HIDUP TUMBUH MERATA. *Jambura Journal of Husbandry and Agriculture Community Serve (JJHCS)*, 1(2).
- Hubeis, A. V. S. (2010). PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DARI MASA KE MASA.
- Hutabarat, J. S., Krismonika, G., & Lofa, E. (2020). PEREMPUAN DI TENGAH KONFLIK DAN UPAYA MEMBANGUN PERDAMAIAN YANG BERKELANJUTAN DI MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(3), 122–131.

- Idul, R. (2022). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGUATAN EKONOMI LOKAL UNTUK MEWUJUDKAN PENCAPAIAN SDGs DI DESA BILUHU BARAT KECAMATAN BILUHU KABUPATEN GORONTALO. *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*, 11(5).
- Indah, I. (2013). PERAN-PERAN PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT. *Academica*, 5(2).
- Iskandar, A. H. (2020). SDGS DESA: PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Istiana Hasan, N., & Kurnia Putra, A. (2020). PERAN PEREMPUAN DALAM MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(2), 169–192.
- Khairunnisa, A., & Adeliya, A. D. (2023). PERAN FEMALE PEACEKEEPERS INDONESIA DALAM MISI PERDAMAIAN UNITED NATIONS INTERIM FORCE IN LEBANON TAHUN 2015-2017. *Global insight journal*, 8(1).
- Kurniawati, W. O. I. ., Yusuf, N. Y. ., Yakub, L. Y. ., Yusuf, N. Y. ., Muhram, L. O. ., Supriadi, S., Munawir, L. O. ., Ismail, L. O. ., Midani, M., & Muthalib, D. A. . (2023). PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT : KESETARAAN GENDER. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya*, 2(05), 206–217. <https://doi.org/10.62668/berkarya.v2i05.584>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2023). KONSEP BISNIS ISLAMI: TUJUAN, KARAKTERISTIK DAN PRINSIP. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 2(02). <https://doi.org/10.62668/jide.v2i02.1189>
- Latifah, E., & Abdullah, R. . (2023). PENDEKATAN METODOLOGIK MATEMATIKA DALAM EKONOMI DAN BISNIS ISLAM. *JIEM : Journal Of International Entrepreneurship And Management*, 2(02), 46–61. <https://doi.org/10.62668/jiem.v2i02.1156>
- La Isa, W. M., Ernawati, E., Mato, R., Mutmainna, A., Darwis, D., Muzakkir, M., & Indriyani, F. (2023). PEMBERIAN HEALTH EDUCATION SEKSUALITAS DENGAN GANGGUAN FUNGSI SEKSUAL PADA WANITA MENUPOUSE DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KASSI-KASSI. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka*, 2(05), 300–307. <https://doi.org/10.62668/sabangka.v2i05.914>

- Lasmini, L., Pingky, L. ., Sari, N. P. ., & Wulandari, R. . (2022). ANALISIS PERAN PENDIDIK DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN METODE PEMBELAJARAN BER CERITA (MENDONGENG) DI PAUD NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN. *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 1(03), 238–246. <https://doi.org/10.62668/bharasumba.v1i03.222>
- Mahanum, M. (2021). TINJAUAN KEPUSTAKAAN. ALACRITY : Journal Of Education, 1(2), 1–12.
- Mahardika, N. M. (2021). PERAN DAN FUNGSI UN WOMEN DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI UGANDA (2014-2021).
- Maisan, I. (2022). PERAN UN WOMEN DALAM IMPLEMENTASI CEDAW UNTUK MENANGANI PERMASALAHAN KESETARAAN GENDER TERHADAP PEREMPUAN DI INDIA 2016-2021.
- Mansyuroh, F. A., & Luthfi, A. H. (2022). INTERNALISASI NILAI KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (SEBUAH STRATEGI PEMBANGUNAN INDONESIA EMAS BERKELANJUTAN 2045). *islamitsch familierecht journal*, 3(02), 157–169.
- Maulana, R., & Supriatna, N. (2019). EKOFEMINISME: PEREMPUAN, ALAM, PERLAWANAN ATAS KUASA PATRIARKI DAN PEMBANGUNAN DUNIA (WANGARI MAATHAI DAN GREEN BELT MOVEMENT 1990-2004). *Factum: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 8(2), 261–276.
- MILA FATMI, I. (2023). PERAN UNITED NATIONS FOR WOMEN (UN WOMEN) DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI LEBANON PADA TAHUN (2018-2020).
- Muhammad, A. S., Tyas, H. S., Puspitasari, C., & Faradina, J. (2022). URGENSI DATA SDGS DALAM MENDUKUNG TATA KELOLA PEMERINTAHAN TANPA KEMISKINAN DI KALURAHAN WONOKROMO KABUPATEN BANTUL. *Jurnal Sociohumaniora Kodepena (JSK)*, 3(2), 223–240.
- Mustofa, M., Bara, A. B., Khusaini, F., Ashari, A., Hertati, L., Mailangkay, A. B., Syafitri, L., Sarie, F., Rustan, F. R., & Hole, M. A. (2023). METODE PENELITIAN KEPUSTAKAAN (Library Research). Get Press Indonesia.
- Nirwana, A. (2021). PERAN UN WOMEN DALAM MEMINIMALISIR KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOLOMBIA.
- Nurdin, N. H., Mahmud, M. N., Sitti Mirsa, & Hamson, Z. (2024). KINERJA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN BONE .

- PHENOMENON : Multidisciplinary Journal Of Sciences and Research*, 2(01), 01–13. <https://doi.org/10.62668/phenomenon.v2i01.960>
- Nurzahra, A. T., Sumantri, S. H., & Hanita, M. (2021). PERAN PEREMPUAN SEBAGAI AGEN PERDAMAIAN PASCAKONFLIK ACEH (STUDI KASUS LIGA INONG ACEH PADA REINTEGRASI INONG BALEE PASCAKONFLIK DI ACEH TAHUN 2005). *Jurnal Damai Dan Resolusi Konflik*, 7(2), 206–231.
- Parawansa, K. I. (2003). PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. BALI, Hlm, 1–15.
- Prihadiansyah, K. D. (2023). GERAKAN FEMINISME DALAM UPAYA PERDAMAIAN DI PASIFIK SELATAN. *Indonesian Journal of International Relations*, 7(1), 101–118.
- Rahmawati, A. (2021). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN DESA WISATA DALAM MENDUKUNG SDG'S DESA. *Journal of Public Power*, 5(2), 151–158.
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., Widiatsih, A., Utomo, E. S., Maghfur, I., & Sofiyana, M. S. (2022). METODE PENELITIAN KUALITATIF. Unisma Press.
- Shamimi, Z., Rijal, N. K., & Afiya, M. A. (2022). EFEKTIVITAS UN WOMEN MENINGKATKAN GENDER EQUALITY DI AFGHANISTAN DALAM PELAKSANAAN AFGHANISTAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (ASDG's). *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 3(1), 1–15.
- Suri, G. A., Hamka, H., & Noerzaman, A. (2020). PERANAN UNITED NATIONS WOMEN DALAM MENGATASI TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA TAHUN 2016-2017. *Independen: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 1(1), 30–40.
- Tui, F. P., & Ilato, R. (2022). PENGUATAN POTENSI KELEMBAGAAN DESA MENUJU PERCEPATAN PENCAPAIAN PEMBANGUNAN DESA BERKELANJUTAN. *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*, 11(2), 331–347.